

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data Badan Pusat Statistik Bantul (BPS, 2019) menunjukkan laju kenaikan penduduk pada tahun 2019 hingga 2022 yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, hasil survey penduduk antar sensus menyatakan ada sebanyak 1.022.788 jiwa penduduk. Lalu pada tahun 2020 tercatat ada sejumlah 1.036.489 jiwa penduduk. Kemudian pada tahun 2021, pertumbuhan penduduk menempati angka 1.050.308 jiwa. Kemudian di tahun 2022 angka jumlah penduduk di Bantul menempati angka 1.064.286 jiwa penduduk. Dengan hal ini, penambahan penduduk setiap tahunnya mempengaruhi volume sampah yang dihasilkan. Ketika populasi tumbuh, kebutuhan akan barang-barang konsumen juga meningkat. Rumah-rumah yang baru memerlukan perabotan dan perlengkapan, makanan harus disediakan untuk lebih banyak orang, dan barang-barang sehari-hari seperti pakaian, peralatan elektronik, dan kendaraan menjadi lebih umum (Taufik & Harningsih, 2021)

Tabel 1.1 Jumlah Sampah Masuk Berdasarkan TPA Piyungan

Tahun	total	
	Ton/Tahun	Ton/Hari
2019	198.024 ton	544 ton
2020	207.932 ton	569,7 ton
2021	255.219 ton	700,9 ton
2022	270.219 ton	742,2 ton

Sumber : TPA Piyungan, 2022

Berdasarkan data volume sampah yang masuk pada TPA piyungan Bantul, didapat informasi bahwa pada setiap tahunnya, volume sampah yang ditampung mengalami kenaikan secara signifikan. Pada tahun 2019 sejumlah 544 ton sampah diterima setiap harinya, lalu menghasilkan sampah sejumlah 198.024 ton dalam setahun. Kemudian beralih pada tahun 2020, sampah yang disalurkan ke TPA piyungan mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebanyak 4,7%. Sebanyak 569,7 ton sampah disalurkan ke TPA piyungan setiap harinya. Total dalam setahun, angka sampah yang diterima mencapai 207.932 ton. Pada tahun 2021, angka jumlah sampah juga melonjak menjadi 700,9 ton setiap harinya. Total sampah yang diterima TPA piyungan dalam setahun mencapai 255.219 ton. Ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 23,0%. Tahun 2022, volume sampah yang diterima TPA piyungan setiap harinya sebesar 742,2 ton. Di tahun 2022, TPA Piyungan mencatat ada sebesar 270.159 ton sampah yang telah diterima.

Volume sampah yang kian naik, semakin memberikan konflik serius antara Masyarakat sekitar TPA piyungan dengan pemerintah setempat, hal ini disebutkan pada (Putri & Hanum, 2021) bahwa Terjadi perselisihan di TPST Piyungan antara pengurus pihak dan warga terdampak. Faktor-faktor penyebab konflik mencakup komunikasi yang buruk, kurangnya kerja sama antara warga dan pengelola yang terkena dampak, kerusakan dan polusi lingkungan, serta kompensasi yang tidak memadai atas dampak negatifnya. Warga TPST Piyungan mengeluhkan bentuk konfrontasi yang mereka saksikan saat melakukan tindakan barikade masuk dan mengeluhkan permasalahan tersebut tidak segera diatasi. Dari menjadi berkurangnya rasa percaya terhadap pengurus partai, semakin besarnya kesatuan kelompok dalam kelompok di antara warga terdampak, dan meningkatnya penekanan pada tugas-tugas pengelolaan sebagai sampah merupakan dampak dari konflik TPST Piyungan.

Table 1.2 Kronologi Konflik TPA Piyungan

waktu	Keterangan
1990-1994	TPST Piyungan dibangun
1995	TPST beroperasi dikelola pemerintah daerah DI Yogyakarta
2000	Dikelola Sekretariat Bersama Yogyakarta Sleman Bantul (SekBer KARTAMANTUL)
2010	Dampak negatif mulai dirasakan warga dan mulai dikeluhkan

	kepada pihak pengelola
2014	Dikelola Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan
29-12-2015	Aksi Blokade pintu masuk TPST Piyungan oleh warga
2017	Pengadaan lahan TPST Piyungan 1,7 Ha
31-12-2018	Aksi Blokade pintu masuk TPST Piyungan oleh warga
2019	Dikelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24-3-2019	Aksi Blokade pintu masuk TPST Piyungan oleh warga dilakukan 6 hari penutupan
25-3-2019	Sidak oleh DPRD DIY
29-7-2019	Audiensi warga TPST Piyungan di DPRD DIY
31-7-2019	Aksi Blokade pintu masuk TPST Piyungan oleh warga
26-9-2019	Pembahasan penentuan besaran Kompensasi Dampak Negatif TPST Piyungan
8-4-2020	TPST Piyungan ditutup sementara selama 3 hari karena kerusakan fasilitas oprasional

Sumber (Putri & Hanum, 2021)

Konflik sampah yang melanda TPA Piyungan telah mengakibatkan gelombang aksi unjuk rasa yang marak dilakukan oleh warga sekitar. Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari akumulasi kekecewaan yang telah lama dirasakan oleh masyarakat terhadap sikap pemerintah yang terkesan mengabaikan aspirasi mereka. Selama periode waktu yang cukup panjang, pemerintah telah terlihat menganggap rendah masyarakat, sehingga mereka merasa memiliki keleluasaan

untuk melakukan pelanggaran aturan tanpa rasa takut akan konsekuensi yang mungkin timbul. (Times Indonesia, 2022)



Gambar 1.1 Aksi Demo Menutup Permanen TPA Piyungan

Sumber : Times Indonesia, 2022

Sebelumnya, telah terjadi perselisihan yang memanas antara pemerintah daerah dan masyarakat sekitar mengenai keberadaan TPA Piyungan serta sejumlah permasalahannya yang memunculkan kontroversi. Ketegangan mencapai puncaknya ketika para warga, dalam tindakan tegas, memutuskan untuk menutup paksa jalan masuk ke TPA Piyungan, menyatakan kekhawatiran akan dampak buruknya terhadap lingkungan sekitar. Adanya ketinggian ketegangan ini tak lepas dari kepedulian akan lingkungan yang semakin tumbuh di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa dampak lingkungan dari operasional TPA Piyungan telah menjadi sumber penderitaan besar bagi mereka. Pengelolaan yang buruk dan kurangnya pengawasan memiliki potensi besar untuk merusak ekosistem lingkungan serta kesehatan manusia yang tinggal di sekitarnya (JPNN.com Jogja, 2022)



Gambar 1.2 Aksi Blokade Jalan Menuju TPA Piyungan

Sumber : Koran Bernas, 2022

Sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh PEMDA DIY, TPA Piyungan resmi ditutup selama waktu yang ditentukan. Hal ini diungkap bahwa alasan penutupan TPA piyungan Bantul, dikarenakan volume sampah telah melebihi kapasitas harian, dan juga lokasi pembuangan sampah sudah terlalu penuh. Kebijakan publik tentang penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, Bantul adalah upaya besar dari pemerintah setempat untuk mengatasi masalah lingkungan dan pengelolaan sampah yang semakin mendesak. Kebijakan ini mencerminkan perubahan signifikan dalam pendekatan terhadap sampah dan lingkungan di Yogyakarta. Selama proses penutupan ini, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk komunitas setempat dan ahli lingkungan, untuk memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan pertimbangan mendalam. Ini merupakan bukti bahwa kebijakan ini adalah hasil kolaborasi dan perhatian terhadap kepentingan bersama (DIY, 2023 : 2)

Dengan ditutupnya TPA Piyungan, memberikan dampak yang dinilai merugikan bagi Masyarakat sekitar. Dikarenakan lokasi TPA ditutup sementara, Masyarakat yang sebelumnya dapat membuang sampah di fasilitas TPA yang telah disediakan, menjadikan Masyarakat harus memutar otak untuk tetap bisa membuang sampah maupun limbah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya. Dengan produksi sampah yang dihasilkan setiap harinya, menjadikan Masyarakat terpaksa mengolah maupun membuang sampah secara illegal. dengan ini, terjadilah aksi membuang sampah secara tidak tertib, sehingga banyak sampah sengaja dibuang pada pinggir jalanan Kabupaten Bantul maupun DIY. (Polsek Mergangsan, 2023:1) akibat dari dilakukannya aktifitas pembuangan sampah secara tidak tertib pada jalanan kabupaten Bantul maupun kota DIY, menyebabkan beberapa dampak negatif. Kerusakan estetika jalanan menjadi salah satu akibat dari brutalnya pembuangan sampah di sepanjang jalanan kota, Hal ini dapat merusak citra kota dan berdampak negatif pada sektor pariwisata dan ekonomi. Lalu, Sampah yang dibiarkan di jalan dapat menghambat lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Ini dapat mengganggu mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi. Lalu, dampak yang memiliki tingkat keseriusan dan menjadi topik masalah penelitian ini adalah, kualitas udara di Bantul memburuk hingga 70% diakibatkan oleh pencemaran sampah (Handoko, 2023)

Ditutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan tentu menciptakan gelombang respon yang beragam dari masyarakat, baik itu dalam bentuk tanggapan yang positif maupun negatif. Respons masyarakat terhadap penutupan TPA ini dapat dengan mudah ditemui di platform media sosial seperti

Twitter. Fenomena penutupan TPA Piyungan menjadi perhatian utama masyarakat karena relevansinya dengan kelangsungan informasi, sehingga respons yang diberikan dianggap cukup cepat dan responsif.

Hal ini menjadi subjek Pro dan Kontra terkait dengan penutupan TPA Piyungan, karena jawaban yang berbeda muncul sebagai akibat dari perbedaan lokasi tempat tinggal. Contohnya, masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Piyungan mungkin merasa gembira dengan penutupannya, karena hal itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas udara, kebersihan lingkungan, dan menghentikan penimbunan sampah yang sudah melebihi batas wajar. Namun, respon yang berbeda mungkin dialami oleh masyarakat yang tinggal jauh dari area TPA Piyungan. Mereka mungkin merasa bingung dan khawatir, karena TPA Piyungan sebelumnya menjadi tempat pembuangan sampah tetap bagi masyarakat di wilayah Bantul, Sleman, dan Yogyakarta.





Gambar 1.3 respon Masyarakat atas ditutupnya TPA Piyungan

Sumber : Media Sosial Twitter, 2023

Tidak sedikit masyarakat yang melontarkan rasa kecewa dan keresahan akibat ditutupnya TPA Piyungan, salah satu tempat pembuangan akhir yang signifikan bagi wilayah DIY. Banyak perbedaan signifikan yang dirasakan oleh Masyarakat, termasuk penurunan kualitas udara yang kian memburuk sejak ditutupnya TPA Piyungan ini. Dampak dari penutupan tersebut telah menjadi perbincangan hangat di berbagai forum masyarakat, tidak terkecuali di media sosial Twitter, di mana respon yang ramai diungkapkan mencerminkan keprihatinan yang mendalam. Hal ini menciptakan situasi di mana banyak orang tertarik untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam menangani masalah lingkungan seperti ini.

Fenomena polusi udara yang memburuk di Bantul pada Juli 2023 akibat penutupan lokasi TPA Piyungan, Bantul, membutuhkan peran komunikasi pemerintahan dalam mendorong kesadaran dan keterlibatan publik terhadap upaya pengelolaan sampah yang lebih baik dan upaya pengurangan polusi udara. Menurut aplikasi pemantau kualitas udara, Nafas Indonesia, (nafas indonesia, 2023) disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta masuk pada daftar daerah

dengan tingkat polusi PM2.5 tertinggi di bulan Juli 2023. Berdasarkan laman web badan kesatuan bangsa dan politik Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menutup Tempat Pembuangan Akhir Regional Piyungan mulai tanggal 23 Juli 2023 hingga 5 September 2023. Hal ini menyebabkan kebiasaan baru yang dilakukan oleh Masyarakat yakni mengelola sampah tidak dengan cara yang baik dan ramah terhadap lingkungan. Tidak banyak dari Masyarakat mulai membakar sampah/limbah rumah tangga. Praktik pembakaran sampah terbuka atau pembakaran limbah yang tidak terkendali dapat mengeluarkan asap dan partikulat yang mencemari udara.

Data sensor nafas menunjukkan kadar PM2.5 mulai meningkat pada tanggal 23 Juli 2023, dengan nilai rata-rata harian maksimum PM2.5 pada tanggal 25 Juli 2023 sebesar 136 g/m³. Setiap hari pada pukul 08.00 pagi terjadi tingkat polusi yang tinggi. Hal ini bisa menjadi tanda jelas adanya penumpukan polusi yang disebabkan oleh pembakaran sampah. Seminggu sebelum kebijakan penutupan TPA Piyungan, Bantul tercatat kualitas udara jauh lebih tinggi dibandingkan minggu berikutnya. Peningkatan PM2,5 cukup signifikan terjadi pasca penutupan TPA di sejumlah lokasi, termasuk Sayidan (Malioboro) dan Sorowajan. 277 g/m³ merupakan konsentrasi PM2.5 tertinggi yang pernah tercatat. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pembakaran sampah telah meningkatkan tingkat polusi udara pagi hari di Jogja secara signifikan, yang semakin fluktuatif selama lebih dari seminggu. Karena kurangnya alternatif yang lebih baik, kebijakan penutupan TPA mempunyai dampak yang signifikan

terhadap pilihan akhir pengelolaan sampah masyarakat, terutama bagi mereka yang memilih untuk membakar sampahnya.

Kegiatan lain yang melatarbelakangi menurunnya kualitas udara di Bantul, adalah kebiasaan warga Masyarakat yang membuang tumpukan sampah sembarangan ke berbagai tempat. Dilansir pada berita harianjogja (leon, 2023) SATPOL PP daerah Bantul telah menemukan beberapa titik yang menjadi sasaran warga Masyarakat Bantul untuk membuang sampah sembarangan. Hal ini selaras dengan penutupan TPA piyungan Bantul, yang menyebabkan warga kebingungan untuk membuang sampah/limbah rumah tangga yang semulanya dapat ditampung di TPA Piyungan, Bantul. Pembuangan ilegal atau sembarangan ini dapat menghasilkan asap beracun dan partikulat, yang dapat merusak kualitas udara dan menyebabkan masalah pernapasan. Disisi lain, Memerangi penumpukan sampah sembarangan memerlukan biaya tambahan bagi pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan sampah yang tidak tepat dapat menghabiskan sumber daya yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya.

Pengendalian dan pencemaran udara merupakan salah satu fokus dari pemerintah. Ini disebabkan oleh pemahaman bahwa polusi udara dapat memiliki dampak serius pada kesehatan manusia, lingkungan, dan ekonomi. Pemerintah memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang polusi udara dan memberikan edukasi tentang cara mengurangi polusi udara serta tindakan yang dapat diambil oleh individu maupun kelompok organisasi. Hal ini tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 Tentang : Pengendalian Pencemaran Udara. Dengan ini, komunikasi pemerintahan merupakan aspek

penting untuk suksesnya komunikasi dari pemerintah terhadap Masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yakni kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan juga polusi udara. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat, bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya juga penting dalam upaya mengendalikan dan mengurangi pencemaran udara. Dengan kerjasama antara pemerintah dan semua pihak terkait, diharapkan kepentingan Bersama dalam mencapai tujuan dapat terlaksana dengan baik (Waluyo, 2019)

Komunikasi pemerintah memainkan peran kunci dalam membentuk kesadaran dan motivasi masyarakat. Melalui komunikasi pemerintahan, Birokrat pemerintah berkomunikasi dengan peserta komunikasi lain, atau bisa disebut komunikan. Hal ini dapat dilihat pada pengusaha untuk organisasi eksternal, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk organisasi internal, dan pejabat pemerintah untuk organisasi internal. Tanpa komunikasi, organisasi pemerintah tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan menggunakan sumber dayanya secara efisien dan efektif, dan pada akhirnya mencapai tujuannya. Organisasi pemerintah dapat mencapai tujuannya sesuai dengan harapan, ketika mereka mempunyai kesadaran akan peristiwa komunikasi yang terjadi dalam organisasi tersebut, seperti apakah pesan diterima dan dilaksanakan dengan benar. Oleh karena itu, komunikasi pemerintah memainkan peran penting dalam mengelola personel dan orang-orang di dalam organisasi pemerintah (Beach, 1975)

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi pemerintah DIY yang terjalin kepada masyarakat, terutama dalam konteks

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), untuk mendorong kesadaran dan keterlibatan publik dalam upaya pengelolaan sampah dan pengurangan polusi udara. Penelitian ini akan mendalami pada beberapa pemangku kepentingan yang menjadi fokus utama, yaitu DLHK DIY (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta), Pengelola TPA Piyungan (Tempat Pembuangan Akhir Piyungan), dan BAPPEDA DIY (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul “Analisis Komunikasi Pemerintah DIY untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah” dikarenakan penelitian ini memandang polusi udara akibat sampah sebagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan di wilayah sekitar. Polusi ini dapat berdampak serius pada kualitas udara, menciptakan risiko penyakit pernapasan, kerusakan ekosistem, dan dampak negatif lainnya. Dengan menyadari ancaman yang dapat terjadi, diharapkan dengan kolaborasi komunikasi pemerintah DIY dapat mendorong kesadaran dan keterlibatan public, dalam Upaya pengelolaan sampah yang lebih baik. Selain itu dengan kesadaran Masyarakat yang terjalin, dapat menghasilkan Upaya pengurangan polusi udara di Kawasan Bantul.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana komunikasi pemerintah DIY untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah pasca penutupan sementara TPA Piyungan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui komunikasi pemerintah DIY untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah pasca penutupan sementara TPA Piyungan.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat membantu mengisi celah dalam literatur tentang komunikasi pemerintahan, terutama dalam konteks pengelolaan sampah dan penanggulangan polusi udara. Ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana pemerintah dapat berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dalam konteks isu lingkungan.

2) Manfaat Pragmatis

Untuk membantu pemerintah dalam merancang strategi yang lebih baik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dan pengurangan polusi udara.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Luas, 2020) dengan judul “Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kawasan Penfui Timur, Kupang” Perlu adanya penyuluhan atau sosialisasi mengenai cara penanganan permasalahan sampah yang baik dan benar.

Dengan menyediakan 186 unit tempat sampah berkapasitas 140 L yang mampu menampung sampah 6 rumah tangga per unitnya, warga dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkannya. Frekuensi pengambilan sampah yang diperlukan adalah tiga hari sekali.

Berdasarkan penelitian (Syahputra & Sariwaty, 2021) dengan judul “Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Penyebaran Informasi Pengelolaan Sampah Sungai Cidurian Selatan Kota Bandung” Pemerintah Kota Bandung melakukan komunikasi pemerintahan berupa pesan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan Sungai Cidurian melalui kegiatan Getaran Citarum (bersih, indah, dan lestari) sebagai strategi komunikasinya dalam mensosialisasikan pengelolaan sampah Sungai Cidurian Bandung. Dalam strategi komunikasi, surat resmi, poster, dan spanduk menjadi media yang digunakan. Dengan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah yang dikepalai oleh RW setempat, berdampak baik pada pengelolaan sampah. Dengan ini, program Citarum Bergetar dinilai efektif dalam menanggulangi permasalahan sampah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Luas, 2020) dengan judul ” Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Menunjang Program Pengurangan Kemasan Plastik Pada Masyarakat Kelurahan Tosuraya Barat” Perubahan komunikasi personal memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan perubahan yang dilakukan oleh media arus utama. Komunikasi massa dapat digunakan untuk menyebarkan pengetahuan, namun komunikasi personal lebih berdampak pada perubahan perilaku. Selain itu, masyarakat juga mulai memahami perlunya

menjaga kebersihan dan pengendalian sampah domestik, seperti memilah sampah berdasarkan jenisnya dan membuangnya pada tempat pembuangan sampah resmi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (O.Roos, 2021) yang berjudul “Sampah Dan Masalah Sosial Kemasyarakatan Di Ahuru Air Besar Kota Ambon” Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi masalah sampah dan dampaknya terhadap masyarakat; Oleh karena itu, terdapat sejumlah permasalahan krusial yang harus menjadi perhatian pemerintah, diantaranya menyederhanakan akses terhadap pembuangan sampah, memaksimalkan kontribusi petugas kebersihan, mengistimewakan petugas kebersihan dengan hadiah, dan Sosialisasi yang konsisten dan aktif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fatimah & Salma, 2021) dengan judul “Pengaruh Komunikasi Pemerintah Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Penanganan Sampah Di Kabupaten Bandung” Persepsi masyarakat dipengaruhi oleh komunikasi pemerintah sebesar 61,4%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi masyarakat dipengaruhi oleh variabel komunikasi pemerintah sebesar 61,4%. Faktor eksternal lainnya menyumbang sisanya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Antin, 2017) dengan judul “Literasi Sampah Berbasis Komunikasi Pembangunan di Kabupaten Bantul” Untuk mewujudkan Bantul bebas sampah 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan Jaringan Pengelolaan Sampah Mandiri AMOR terus melanjutkan inisiatif literasi sampah. Keberadaan JPSM membantu terciptanya organisasi pengelolaan sampah baru yang mandiri. Selain itu, JPSM membantu

mengurangi volume sampah sebesar 30%. Pertemuan-pertemuan baik secara formal maupun informal menjadi bagaimana strategi komunikasi pembangunan kegiatan literasi dilakukan. Meskipun terdapat perpaduan definisi antara media sosial, media massa, dan komunikasi interpersonal, namun intensitasnya masih cukup rendah. Mendekati dan mempengaruhi individu akan lebih berhasil bila dilakukan melalui komunikasi interpersonal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Shahreza, 2020) dengan judul “Komunikasi Lingkungan Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Di Tangerang Selatan” Pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup), pengepul, dan komunitas bank sampah semuanya mempunyai kepentingan yang disatukan oleh proses komunikasi lingkungan dalam pengelolaan sampah antar pemangku kepentingan pendukung. Model komunikasi konvergen saling pengertian dan saling ketergantungan yang akhirnya diciptakan oleh ketiga pihak ini turut menjadikan bank sampah sebagai isu publik dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Antin, 2018) yang berjudul “Dinamika Peran Jejaring Pengelolaan Sampah Dalam Komunikasi Literasi Sampah” Melalui pola komunikasi pada tingkat makro dan mikro, JPSM “AMOR” berfungsi sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat serta sebagai agen pemberdayaan dalam rangka komunikasi literasi sampah. Ada pola komunikasi tingkat global dan mikro yang terjadi. Jika JPSM dan KPSM serta anggotanya berkomunikasi secara mikro, maka pola komunikasi makro terjadi antara JPSM dengan pihak luar atau sebaliknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Okhtafianny & Ariani, 2023) dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh” dikarenakan sosialisasi hanya terjadi pada saat Peraturan Daerah ditetapkan dan tidak konsisten tanggal pelaksanaannya, komunikasi antara DLH dengan masyarakat kurang ideal. DLH kekurangan sumber daya manusia, dan anggaran yang terbatas menyulitkan penerapan kebijakan. Hambatan lainnya adalah kurangnya sosialisasi program, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan penerapan denda yang belum ditegakkan. Untuk mencapai kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi, pemerintah harus meningkatkan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan mematuhi peraturan daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Brotosusilo & Hilya Nabila, 2020) dengan judul “Community engagement and waste management policy: A comparative analysis” Hambatan utama terhadap kebijakan pengelolaan sampah adalah: 1) sulitnya mempengaruhi perilaku sosial, seperti tantangan meningkatkan kemauan membayar (WTP) masyarakat dan kebiasaan mendaur ulang; 2) kurangnya infrastruktur pembuangan sampah di banyak wilayah pedesaan; 3) belum adanya organisasi pemerintah mengenai pemulung; dan 4) kurangnya kemajuan dalam pengelolaan limbah dan lingkungan teknologi daur ulang yang tidak berbahaya. Untuk memaksimalkan efektivitas strategi pengelolaan sampah, keterlibatan masyarakat sangatlah penting. Selain itu, kebijakan pengelolaan sampah harus menekankan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang daur ulang dan memperluas tanggung jawab produsen untuk meningkatkan keterlibatan

masyarakat dan mendorong pengelolaan sampah yang efektif di suatu wilayah atau negara.

Kesamaan antara isi jurnal penelitian terdahulu dan isi penelitian yang penulis angkat adalah mengenai efektifitas pengelolaan sampah. Baik dalam tema yang penulis teliti maupun dalam 10 jurnal yang penulis temukan, fokusnya adalah pada bagaimana strategi pengelolaan sampah diimplementasikan. Perbedaan yang terkandung dalam penelitian ini penyusun ingin melihat bagaimana komunikasi pemerintah DIY yang dilakukan oleh aktor aktor pemangku pengelolaan sampah DIY kepada Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat terkait pengelolaan sampah.

F. Kerangka Teori

Pada sub bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai teori terdahulu yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan diangkat. Dengan menemukan teori terkait, peneliti memiliki acuan kredibel dalam penulisan penelitian ini. Sumber dari teori-teori yang tercantum, bersumber dari jurnal terdahulu yang telah dianggap absolut sehingga dapat dijadikan sebagai acuan penelitian. Dengan teori dari jurnal maupun buku temuan terdahulu, dapat mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian. Membaca dan menemukan temuan dari jurnal terdahulu dapat menghindari peneliti dari duplikasi dan pengulangan penelitian yang sudah dilakukan, sehingga penelitian dianggap tidak efisien. Penelitian

sebelumnya menjadi acuan penulisan penelitian ini. Dengan relevansi penelitian terdahulu, peneliti telah menganalisa penelitian yang akan dijadikan acuan.

1. Komunikasi Pemerintahan

Menurut Wilbur scram pada (Asmadi, 2018) komunikasi berasal dari Bahasa latin (cummunis) yang berarti umum (common) atau bersama. Kenyataannya, ketika kita berbicara dengan seseorang, kita mencoba menciptakan rasa kebersamaan. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang dapat menumbuhkan kebersamaan, saling pengertian antara pihak yang menyampaikan pesan (informasi) dan pihak yang menerimanya, serta apa yang ingin dicapai oleh pengirim pesan ketika menyampaikan pesan tersebut dapat sampai kepada penerima pesan. Dalam bentuknya yang paling mendasar, komunikasi adalah proses ekspresi manusia. Tentu saja, setiap orang mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka ingin mengungkapkan perasaan atau idenya. Tentu saja, bahasa digunakan dan digunakan sebagai alat komunikasi ketika perasaan dan pikiran diungkapkan. Setiap orang atau kelompok yang mengkomunikasikan sesuatu disebut sebagai komunikator dalam bidang komunikasi. Pesan adalah sesuatu yang dikomunikasikan atau diungkapkan. Komunikan adalah seseorang atau apapun yang menerima komunikasi (Mufid, 2013 : 4)

Sedangkan pemerintahan, kata “pemerintah” dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin “gubernare,” yang berarti menggerakkan atau

mengendalikan dalam bahasa Yunani. Tujuan pemerintah juga mencakup kebebasan, keadilan, ketertiban internal, dan kesejahteraan Masyarakat (syafiee, 2014 : 6). Pemerintahan, dalam arti luas, juga diartikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan oleh Negara untuk kesejahteraan warga negaranya dan kepentingan Negara itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya sekedar menjalankan fungsi eksekutif, namun juga mencakup fungsi legislatif dan yudikatif (BPS Prov. Jawa Timur, 2023 : 1) hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh (ndraha 2011:5) bahwa “Pemerintahan merupakan suatu system multiproses yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil”

Dengan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah sekelompok orang yang mengelola suatu sistem untuk mengendalikan kehidupan keseharian dalam aspek sosial. Pemerintah sebagai penanggung jawab tidak dapat berfungsi secara independen dari masyarakat karena dibentuk untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan sosial dan kepentingan masyarakat. Pemerintah memiliki peran dalam mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan sosial dan kepentingan masyarakat. Hal tersebut merupakan landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Menurut definisi komunikasi dan pemerintahan yang telah disebutkan, komunikasi pemerintah adalah penyebaran pesan kepada masyarakat umum. Tujuannya agar pemerintah dan masyarakat mempunyai pemahaman yang sama dan masyarakat sadar akan suatu permasalahan yang sedang terjadi. Dengan hal

ini, komunikasi pemerintahan menjadi aspek penting dalam pemerintahan untuk menjalankan tugas untuk mencapai kepentingan bersama. Pesan yang dapat disampaikan dalam komunikasi pemerintahan antara lain mengkomunikasikan peraturan, kebijakan, program, penyelesaian konflik, dan lain sebagainya.

Menurut (Malone, 1997: 170) Komunikasi pemerintah adalah komunikasi manusia yang terjadi dalam kerangka lembaga pemerintah. Oleh karena itu, komunikasi pemerintah merupakan salah satu komponen komunikasi organisasi yang tidak dapat dipisahkan dari konteksnya. Melalui jaringan yang hubungannya didasarkan pada aturan formal, aliran pengiriman dan penerimaan pesan tercapai. Sinyal yang dikirim dan diterima mempunyai berbagai bentuk, seperti informasi, ide yang dibagikan, arahan yang diberikan, atau perasaan yang diungkapkan. (hasan 2014 : 24) mengatakan komunikasi pemerintah adalah sosialisasi konsep, kebijakan, dan program kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam hal ini, pemerintah adalah komunikator dan masyarakat adalah komunikan, namun hubungan ini dapat berbeda sesuai dengan ide, aspirasi, dan keinginan Masyarakat yang dikomunikasikan kepada pemerintah. Pemerintah diperlukan untuk mendengar, dan juga mempertimbangkan gagasan Masyarakat. Tanpa komunikasi, organisasi pemerintah tidak akan mampu melaksanakan tugasnya secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan pada akhirnya mereka tidak akan mampu mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

Komunikasi pemerintahan merupakan cara penyampaian pesan atau informasi dari pusat ke bawahan pada suatu organisasi. Menurut (Andre Hardjana

2016) terdapat fungsi arus komunikasi pusat kepada bawahan (arus informasi ke bawah) yaitu :

- 1) pemahaman informasi mengenai intruksi kerja
- 2) penginformasian mengenai alasan dilakukannya suatu pekerjaan
- 3) memberikan informasi mengenai peraturan yang berlaku pada Perusahaan/organisasi
- 4) penyampaian motivasi atau nasihat untuk kepentingan Bersama agar dapat bekerja secara maksimal.

Sebaliknya, komunikasi pemerintahan terdapat arus informasi ke atas, dimana informasi didapatkan dari bawahan dan ditujukan pada atasan. Arus informasi ke atas memiliki fungsi antara lain :

- 1) pemberian informasi mengenai tugas maupun pekerjaan yang telak terlaksana
- 2) penyampaian mengenai hal-hal di lapangan terkait kendala yang menyebabkan tugas tidak dapat diselesaikan
- 3) penyampaian saran mengenai system maupun pekerjaan
- 4) penyampaian mengenai kesulitan yang dihadapi bawahan dalam melaksanakan pekerjaannya.

a. Bentuk Komunikasi Pemerintahan

Menurut (silalahi, 2004 : 41) pada komunikasi pemerintahan, terdapat dua pembagian komunikasi, yaitu komunikasi pemerintahan internal maupun eksternal.

1. Komunikasi Internal

Muhyadi dalam Kambey (2003:166) mengemukakan komunikasi internal ialah proses komunikasi yang terjadi didalam lingkup organisasi maupun Perusahaan. Actor yang terlibat dalam komunikasi pemerintahan dapat mencakup antara atasan dengan atasan, atasan dengan bawahan, maupun bawahan dengan bawahan yang memiliki kepentingan maupun hubungan masing masing dalam organisasi maupun Perusahaan.

Menimbang pada teori yang dikemukakan (Pace dan Faules 2013:171) bahwa komunikasi internal terbagi menjadi dua dimensi, diantaranya merupakan dimensi vertical (kebawah) dan dimensi horizontal (setara).

a. Komunikasi Vertikal, menurut (Haryati, 2019) memainkan peran penting dalam organisasi operasi. Informasi, pengendalian, insentif, dan pengungkapan emosi adalah beberapa di antaranya. Komunikasi vertikal berfungsi sebagai fungsi informasi dengan bertindak sebagai proses internal untuk distribusi dan penerimaan pesan untuk kepentingan individu dan kelompok dan sangat membantu sebagai panduan pengambilan keputusan atau pilihan. Komunikasi vertikal berfungsi sebagai peran kontrol bagi anggota organisasi, yang dilakukan oleh manajer pada tingkat tersebut. Ini membantu organisasi menjadi lebih fokus. Anggota yang menjadi bagian dari organisasi yang terstruktur secara hierarki dapat dimotivasi oleh komunikasi vertikal untuk mendukung rekan-rekannya dalam meningkatkan kinerja.

b. Komunikasi Horizontal, menurut Nathania pada (Swandhana, 2017) adalah komunikasi yang menunjukkan pergerakan informasi yang menyamping, yaitu bergerak sesuai dengan aturan yang berlaku pada individu serupa/sejajar di dalam suatu organisasi. Kinerja dan aliran komunikasi horizontal saling berkaitan karena sebagai alat manajemen, komunikasi sering kali diharapkan dapat mengkoordinasikan kegiatan, berbagi informasi dengan anggota, mengurangi beban administratif dan peraturan yang tidak perlu, serta meningkatkan kinerja. Komunikasi horizontal memiliki beberapa fungsi, diantaranya : pengkoordinasian tugas, mencari jalan keluar permasalahan, Berbagi informasi kepada rekan kerja, dan juga resolusi konflik.

c. Komunikasi Diagonal menurut (Ni Made Paramita Utami Dewi, I Made Astrama, 2022) adalah komunikasi kepemimpinan dan karyawan dengan arus komunikasi lintas atau menyilang. Komunikasi diagonal merupakan gaya komunikasi yang terjadi dalam organisasi tertentu antara individu-individu yang tidak berakar kuat dalam hubungan hierarki tunggal dengan individu lain melainkan berinteraksi dengan departemen atau tim yang berbeda. Dengan kata lain, hal ini mendorong komunikasi yang mencakup berbagai tingkatan dan departemen serta menciptakan sumbu diagonal di dalam struktur organisasi.

2. Komunikasi Eksternal

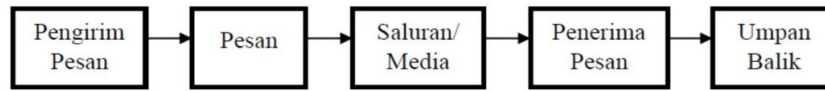
Komunikasi eksternal merupakan proses komunikasi yang terjadi antara suatu organisasi atau perusahaan dengan pihak eksternal, seperti pelanggan, mitra bisnis, media massa, pemerintah, dan masyarakat umum. Tujuan dari komunikasi

eksternal adalah untuk membangun hubungan baik dengan pihak eksternal tersebut, menginformasikan kepada mereka tentang produk, layanan atau informasi yang relevan, dan meningkatkan citra positif perusahaan atau organisasi (Alipi, 2019) Komunikasi eksternal bersifat lintas saluran yang berarti mempunyai batasan dengan pihak eksternal seperti pemerintah, pelanggan, dan masyarakat luas. Organisasi dapat menggunakan departemen media atau departemen *public relations* untuk beriklan kepada pihak luar.

Menurut (Kurniasih, 2021) Kegiatan hubungan masyarakat seperti komunikasi eksternal berfungsi sebagai penghubung antara bisnis atau institusi dan masyarakat umum. Salah satu hal yang harus dilakukan ketika melakukan operasi komunikasi eksternal adalah dengan menggunakan kampanye *public relations*. Kampanye *public relations* yang dijalankan akan berdampak pada bagaimana perusahaan atau institusi dipandang oleh masyarakat luas. Petugas hubungan masyarakat bertanggung jawab atas desain dan implementasi program hubungan masyarakat.

b. Komponen Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi pemerintahan tidak lepas dari komponen komponen yang menunjang lancarnya proses komunikasi yang rumit. Dengan memperhatikan komponen komponen pada komunikasi pemerintahan, komunikasi dapat terjalin lancar dan sesuai dengan tujuan. Berikut merupakan alur komponen komunikasi pemerintahan :



Gambar 1.4 Komponen Komunikasi Pemerintahan

Sumber: Mathematics, 2016

c. Bentuk Media/ Saluran Pada Komunikasi Pemerintahan

Dalam rangka mengkomunikasikan pengambilan keputusan pemerintah, pencetus kebijakan public harus selektif dalam memilih dan menyampaikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar organisasi, yang berarti masyarakat dapat menerima informasi yang disampaikan pemerintah melalui jalur komunikasi resmi. Saluran Dalam konteks komunikasi pemerintah, informasi saluran resmi dapat disebarakan melalui seperti berita, buku pegangan, laporan, atau komunikasi tertulis. sementara saluran informal dapat diterima melalui interaksi tatap muka, percakapan telepon, atau kontak verbal (Putri Pratiwi, 2021). Media komunikasi pemerintahan dibagi berdasarkan jenis komunikasi pemerintahannya, yaitu komunikasi eksternal dan komunikasi internal (Silalahi, 2004).

Media komunikasi eksternal adalah sarana atau alat yang digunakan oleh sebuah organisasi atau entitas untuk berkomunikasi dengan audiens atau masyarakat luas di luar organisasi tersebut. Media komunikasi eksternal dapat melalui media cetak seperti surat kabar, koran, majalah, maupun buku. Lalu dapat melalui media audio visual seperti film, berita televisi, dan video. Lalu dapat

melalui media visual, seperti pada karya Lukis, pameran maupun foto. Lalu dapat melalui media auditif seperti telpon, radio dan media yang dapat didengan lainnya.

Media komunikasi internal adalah sarana penyampaian berita yang dilakukan oleh sesama anggota organisasi maupun Perusahaan untuk memberikan informasi terkait organisasi maupun Perusahaan. Media komunikasi internal meliputi dua macam Jenis, yaitu saluran media internal tulis, dan saluran media komunikasi internal lisan. Dengan media tertulis, dapat melalui papan pengumuman, nota, laporan tahunan, kotak saran, dan media yang dapat dibaca lainnya. Media lisan dapat melalui rapat internal, wawancara, konferensi, dan media yang dapat didengar lainnya (Silalahi, 2004)

d. Proses Komunikasi Pemerintahan

Seperti halnya pada umumnya komunikasi, komunikasi pemerintahan merupakan suatu proses pengiriman pesan dengan proses yang melibatkan unsur komponen pada komunikasi seperti pengirim, pesan, media, penerima, dan *feedback* untuk mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan yang diharapkan (Mathematics, 2016) berikut definisi dari unsur-unsur yang berurutan :

1. Pengirim (*speaker*) atau bisa disebut komunikator dapat diwakili oleh suatu dinas dan dapat menjalankan tugasnya secara langsung atas nama dinas tersebut. Untuk membuat proses penyampaian pesan kepada komunikan menjadi sesederhana mungkin,

komunikator dalam proses komunikasi pemerintah berkoordinasi dengan otoritas atau lembaga terkait. Pesan yang disampaikan secara bebas kepada masyarakat merupakan satu-satunya kekuatan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh komunikator. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk membujuk masyarakat agar mendukung atau berpartisipasi dalam kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.

2. Pesan (*message*), merupakan informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada penerima (*audiens*) pesan dapat berupa surat edaran, maupun kebijakan tertulis dari pemerintah.
3. Media saluran, merupakan suatu jalur komunikasi yang memungkinkan informasi dapat disampaikan dari komunikator ke komunikan. Hal ini berlaku dalam komunikasi pemerintahan, dimana permainan dua arah dan proses komunikasi timbal balik menggunakan media untuk menyalurkan opini publik dari komunikator ke komunikan dan sebaliknya.
4. Penerima (*audiens*), atau bisa disebut komunikan, sasaran komunikasi dari komunikator. Komunikan pada komunikasi pemerintahan mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ialah masyarakat umum.
5. Efek (*feedback*), merupakan efek yang terjadi setelah dilakukannya komunikasi dari komunikator kepada komunikan. Menurut (Erliana, 2014) Umpan balik merupakan jawaban bagi

komunikator. Komunikator menyampaikan pesan setelah menerimanya. Umpan balik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan respons dan tindakan terhadap pesan. Setelah komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan, terjadilah umpan balik. Tanggapan terhadap komunikasi ini dapat berupa sudut pandang yang diketahui secara luas. Opini publik mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi atau mengendalikan publik. Opini publik lebih dari sekedar tanggapan audiens terhadap pernyataan atau percakapan politik yang disampaikan oleh politisi melalui media atau media lain yang mereka pilih.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat mengacu pada tugas dan hak warga negara untuk membantu mencapai tujuan kolektif negara. Partisipasi Masyarakat bertujuan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan melalui penggunaan inisiatif dan kreativitas. Kontribusi yang kreatif dan tajam dapat dilakukan dalam pertemuan antara kelompok masyarakat. Masyarakat dan pemerintah akan bertukar informasi pada saat pertemuan atau rapat. Akibatnya terjadi komunikasi dalam keterlibatan antara masyarakat dengan pemerintah maupun antar pihak yang terlibat. Untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat mengadakan forum dan pembicaraan untuk mengambil keputusan kepentingan bersama. Di sisi lain, perwakilan Masyarakat atau individu berpartisipasi dalam suatu organisasi atau komite dengan diberi kepercayaan atas mandat dari mereka.

a. Pengertian Partisipasi

Definisi partisipasi menurut (Pidarta, 2009) merupakan tindakan melibatkan diri sendiri atau beberapa individu dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat bermanifestasi sebagai akuntabilitas atas segala keterlibatan, keterlibatan mental dan emosional, serta keterlibatan fisik dalam menggunakan seluruh kemampuannya (mengambil inisiatif) dalam segala aktivitas yang dilakukan dan mendukung tercapainya tujuan.

Partisipasi dapat diartikan ketika seseorang secara mental dan emosional terlibat dalam lingkungan kelompok, mereka cenderung mendukung tujuan kelompok dan mengambil tanggung jawab terhadap kelompok. Menurut sudut pandang yang berbeda, partisipasi adalah tindakan individu yang menyumbangkan ide dan perasaan mereka terhadap kelompok dan mengambil tanggung jawab terhadap kelompok (Pidarta, 2009)

Menurut Huneryear dan Heoman dalam (Kinanda & Surya, 2020) Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam lingkungan kelompok yang memotivasi mereka untuk berbagi kewajiban bersama dan berkontribusi pada tujuan kelompok.

b. Jenis Partisipasi Masyarakat

Menurut Sekretariat Bina Desa pada (Pidarta, 2009) jenis partisipasi Masyarakat terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain :

- 1) Partisipasi pasif, Masyarakat diberi informasi tentang apa yang sedang terjadi; deklarasi sepihak yang dibuat oleh pelaksana atau pemerintah

tanpa mempertimbangkan masukan dari masyarakat, hanya spesialis di luar kelompok sasaran yang bertukar informasi.

- 2) Partisipasi dengan informasi, Masyarakat umum berpartisipasi dengan menanggapi pertanyaan penelitian dengan menggunakan kuesioner atau cara lain yang serupa, masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian
- 3) Partisipasi melalui konsultasi, masyarakat terlibat dalam konsultasi, pihak luar memperhatikan dan merumuskan pendapat mereka sendiri sebelum mendefinisikan permasalahan dan menyarankan solusi potensial dengan mengubah tanggapan yang dipublikasikan. Para profesional tidak wajib memberikan pendapatnya kepada masyarakat sebagai masukan untuk langkah ke depan, sehingga kurangnya kesempatan untuk berkolaborasi dalam pengambilan keputusan.
- 4) Partisipasi untuk insentif materiil, masyarakat mengambil bagian dengan menyumbangkan sumber daya seperti tenaga kerja untuk memperoleh makanan, gaji, tunjangan, dan kebutuhan lainnya. Masyarakat umum tidak terlibat dalam proses persidangan atau pendidikan, masyarakat tidak tertarik untuk melakukan tindakan yang sedang berlangsung ketika insentif ditawarkan atau diterima.
- 5) Partisipasi fungsional, masyarakat terlibat dengan membentuk kelompok untuk bekerja mencapai tujuan terkait proyek. Kelompok-kelompok ini biasanya dibentuk setelah keputusan dibuat dan prinsip-prinsip ditetapkan.

Pada awalnya, kelompok-kelompok ini bergantung pada sumber luar (fasilitator, dll.), namun pada akhirnya mereka menjadi mandiri.

- 6) Partisipasi interaktif, Masyarakat ikut serta dalam analisis bersama, yang menghasilkan perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga-lembaga sosial baru atau penguatan lembaga-lembaga sosial yang sudah ada. Partisipasi ini biasanya melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur. Kelompok masyarakat mempunyai peran dalam segala kegiatan karena mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- 7) Partisipasi dengan inisiatif, Masyarakat mengambil bagian dengan mengubah sistem atau nilai-nilainya atas inisiatif sendiri, bebas dari tekanan luar. Lembaga ini menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan teknis yang diperlukan, dan bertanggung jawab untuk menggunakan sumber daya yang sudah ada.

Pada dasarnya, keberlanjutan suatu program tidak dapat dijamin hanya dengan partisipasi saja. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi akan menentukan keberhasilannya. Hal ini menunjukkan sejauh mana masyarakat umum memahami suatu program sehingga mereka ikut berpartisipasi dalam program yang akan dijalankan.

3. Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan material atau benda yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis, estetis, atau praktis, dan oleh karena itu dibuang atau dianggap sebagai limbah. Sampah dapat berupa bahan padat, cair, atau gas yang dihasilkan oleh aktivitas manusia atau proses alamiah. Sampah dapat berasal dari berbagai sumber, seperti rumah tangga, industri, komersial, pertanian, dan sebagainya. Contoh-contoh sampah meliputi sisa makanan, kemasan plastik, kertas bekas, logam bekas, limbah elektronik, limbah medis, dan banyak lagi. Manajemen sampah adalah pendekatan yang digunakan untuk mengelola sampah dengan cara yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Ini termasuk pengumpulan, pemrosesan, daur ulang, pembuangan akhir, dan upaya-upaya lain untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia (Enri Damanhuri, 2010)

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai hasil samping kegiatan manusia biasa atau proses alami oleh alam. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Jenis Sampah Rumah tangga menegaskan Kembali, definisi sampah rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga biasa, tidak termasuk kotoran dan sampah tertentu lainnya. Sampah rumah tangga yang berasal dari tempat usaha, industri, tempat khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya termasuk jenis sampah.

a. Siklus Hidup Sampah

Siklus hidup sampah merupakan gambaran perjalanan sampah dari awal hingga akhir, mulai dari pembentukan sampah hingga pembuangan akhir. Siklus ini melibatkan beberapa tahapan yang penting dalam pengelolaan sampah (Purwanti, 2021). Berikut adalah tahapan dalam siklus hidup sampah :

1. Generasi Sampah, fase dimana ini merupakan tahap awal terbentuknya sampah. Sampah terbentuk dari aktivitas manusia, proses industry, maupun proses alamiah dan menghasilkan sampah dalam beberapa jenis, yaitu limbah rumah tangga, pertanian, industry, maupun komersial.
2. Pengumpulan, fase ini merupakan Tindakan awal dihasilkannya sampah. Tindakan ini berupa mengumpulkan sampah dari berbagai asal penghasil sampah, dengan cara diambil oleh petugas kebersihan ataupun pengumpulan sampah pada tempat sampah yang telah disediakan di lokasi terdekat dengan pemukiman.
3. Transportasi, sampah yang telah dikumpulkan atau diambil kemudian disalurkan pada TPA daerah tersebut. Proses pengantaran sampah ini dapat menggunakan transportasi truk maupun kendaraan pengangkut lainnya.
4. Pemrosesan, ketika sampah telah sampai fasilitas pengolahan sampah, sampah akan dilakukan beberapa proses, yaitu pemisahan, daur ulang, dan pengolahan energi. Hal ini bertujuan untuk memisahkan antara sampah yang dapat didaur ulang dan mengelola sampah dengan cara yang lebih efisien, dengan ini volume sampah dapat berkurang
5. Pembuangan Akhir, pada tahap ini sampah yang sudah tidak dapat dilakukan pemrosesan daur ulang akan dikirim ke tempat pembuangan

akhir. Pembuangan akhir diharuskan untuk dilakukan dengan standar yang telah ditentukan oleh kebijakan yang berlaku.

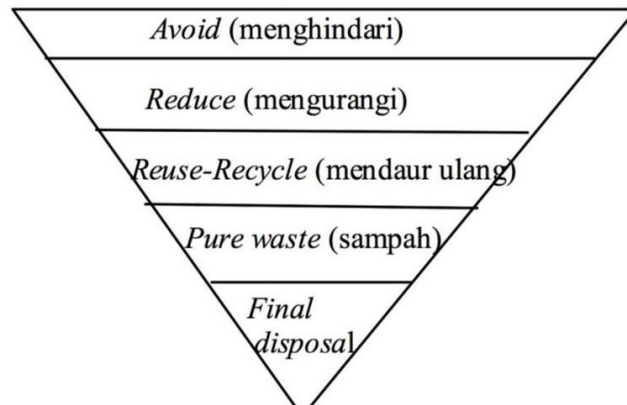
Siklus hidup sampah adalah konsep yang penting dalam upaya mengelola sampah secara efektif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pencegahan, daur ulang, dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan.

b. Piramida Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah mencakup seluruh tindakan yang dilakukan untuk menangani sampah, mulai dari saat sampah diproduksi hingga akhirnya dibuang. Oleh Pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan merupakan kegiatan utama pengelolaan sampah. (Suryani, 2014) Menurut SK SNI T-13-1990-F, sistem pengelolaan sampah perkotaan pada hakikatnya dipandang sebagai komponen-komponen subsistem yang saling berinteraksi, menunjang, dan berhubungan satu sama lain. Factor-faktor ini menjadi persyaratan dasar untuk pengelolaan sampah yang efektif. Terdapat keterkaitan yang erat dan saling mendukung antara satu komponen dengan unsur lainnya.

Lembaga berperan sebagai pelaksana dan penggerak agar sistem secara keseluruhan dapat berjalan efektif. Dukungan finansial untuk kebutuhan operasional yang diberikan melalui anggaran dan sumber pendanaan menjadi factor penunjang suksesnya pengelolaan sampah. Untuk mencapai lingkungan yang bersih dan bebas sampah, masyarakat harus mengubah cara pandang

terhadap sampah. Hal ini dapat direpresentasikan dengan hierarki pengelolaan sampah yang berbentuk piramida terbalik seperti gambar di bawah ini



Gambar 1.5 Piramida Pengelolaan Sampah

Sumber : Li, 2008

- a. Tahap pertama *avoid* ialah bentuk menghindari penggunaan barang yang dapat menghasilkan sampah lebih banyak. Contoh kecil dapat dilakukan Ketika berbelanja, membawa kantong belanja sendiri agar tidak perlu menggunakan kantong plastic. Dengan meminimalisir penggunaan barang yang dapat menambah sampah, sedikit juga sampah yang akan dihasilkan.
- b. Tahap kedua *reduce*, yaitu mengurangi pemakaian barang yang menghasilkan sampah, hal ini dapat diganti dengan mengganti barang tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan
- c. Tahap ketiga *reuse recycle*, yaitu dengan mendaur ulang sampah yang dapat di daur ulang seperti sampah berbahan plastic
- d. Tahap keempat *pure waste*, yaitu membuang barang/ sampah yang sudah tidak bisa didaur-ulang ataupun diolah lagi

- e. Tahap terakhir, *final disposal*, ialah tahap yang paling akhir yaitu membuang sampah ke TPA.

c. Kebijakan dan Peraturan Sampah

Kebijakan adalah tindakan yang mengatur pengelolaan dan distribusi sumber daya alam, keuangan, dan manusia untuk kepentingan masyarakat umum atau komunitas. Keberhasilan kebijakan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat tercapai berkat adanya organisasi yang bertanggung jawab dengan struktur organisasi yang transparan. Kebijakan pengelolaan sampah Kota Yogyakarta terdiri dari peraturan persampahan yang mengikat serta kebijakan pimpinan instansi pemerintah yang menghasilkan program kerja pengelolaan sampah. (Ii, 2008) Dasar kebijakan pengelolaan sampah yang mengatur kebijakan pengelolaan sampah di DIY antara lain :

Tabel 1.3 Kebijakan dan Peraturan Sampah

No	Perundangan	Jenis perundangan
1.	UU RI	Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Undang-undang RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
2.	Peraturan Menteri RI	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Pedman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah.
		Permendagri No. 33 Tahun 2010 Tentang

		Pedoman Pengelolaan Sampah
3	IY Peraturan Daerah	Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
		Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, Dan Kompensasi Lingkungan
4	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta	Perda Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan...
		Perda Kota Yogyakarta No. 21 Tahun 2002 Tentang Retribusi Kebersihan.
		Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
		Peraturan Walikota Yogyakarta No. 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
		Peraturan Walikota Yogyakarta No. 60 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi

		Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5.	Keputusan Bersama Bantul, Sleman, dan Yogyakarta	Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor: 152a Tahun 2004, 02/SKB.KDH/A/2004, 03 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antara Kab. Bantul, Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta
		Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Di Piyungan Kabupaten Bantul Nomor : 01/Perj.YK/2011, 02/PK.KDH/A/2011, 03/Perj/Bt/2011

Sumber : Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan landasan suatu gagasan yang menjadikan pokok bahasan kajiannya jelas. Menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran terhadap variabel penelitian yang akan diteliti antara pengertian peneliti dan pembaca merupakan salah satu tujuan definisi konseptual. Definisi yang dianggap umum dan paling dapat diterapkan biasanya digunakan

untuk membuat definisi konseptual. Istilah ini didefinisikan dalam konseptualisasi penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel dan kesulitan penelitian.

Antara lain :

1. Komunikasi Pemerintah

komunikasi pemerintah adalah proses penyampaian informasi dan pesan antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat umum, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain, dikenal dengan istilah komunikasi pemerintah. Untuk melaksanakan kewajiban resmi secara efisien dan transparan, komunikasi pemerintah sangatlah penting.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merujuk pada proses di mana individu, kelompok, atau komunitas secara aktif terlibat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, atau budaya. Ini mencakup keterlibatan yang aktif dan kontribusi dari warga negara dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan permasalahan yang memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga tingkat nasional dan internasional. Hal ini merupakan elemen kunci dalam proses demokratisasi dan praktik tata kelola yang baik.

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merujuk pada rangkaian tindakan yang terdiri dari mengumpulkan, mengangkut, mengolah, dan membuang sampah dengan tujuan mencapai manajemen limbah yang efektif dan berkelanjutan. Fokus utama dari pengelolaan sampah adalah mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan masyarakat secara keseluruhan.

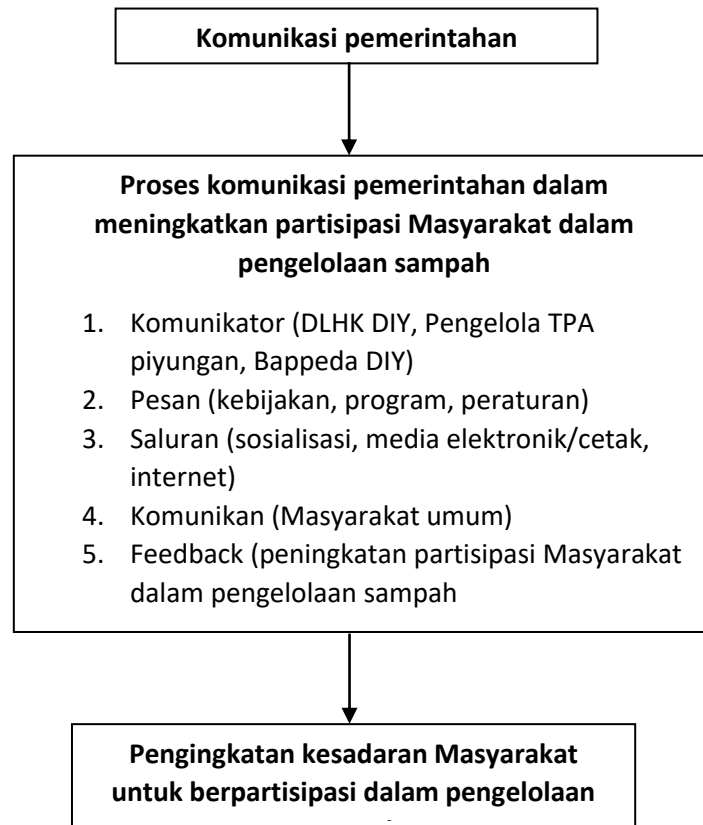
H. Definisi operasional

Seperti halnya pada umumnya komunikasi, komunikasi pemerintahan merupakan suatu proses pengiriman pesan dengan proses yang melibatkan unsur komponen pada komunikasi seperti pengirim, pesan, media, penerima, dan feedback untuk mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan yang diharapkan (Mathematics, 2016)

Tabel 1.4 Definisi Operasiona

Variabel	Indikator	Parameter
Komunikasi pemerintahan	Komunikator	DLHK DIY, pengelola TPA piyungan, BAPPEDA DIY
	Pesan	Kebijakan, program
	Media	Digital : media sosial, situs web
	Komunikan	Masyarakat umum
	Feedback	Respon Komunikan

I. Kerangka berpikir



Gambar 1.3 Kerangka Berpikir

J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut (Cresswell, 2018) penelitian kualitatif merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena manusia secara mendalam dengan memahami definisi, gagasan, dan sudut pandangnya dalam lingkungan sosial. Pemahaman mengenai pentingnya pengalaman, konsepsi, sikap, dan pemikiran manusia ditekankan dalam penelitian kualitatif. Dalam kajian ini, penulis berupaya mendefinisikan komunikasi pemerintah secara sistematis untuk kemudian diartikulasikan, dideskripsikan,

direpresentasikan, dan diinterpretasikan secara jelas dan menyeluruh dalam upaya meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Informasi yang telah diperoleh dari informan baik data sekunder maupun data primer, kemudian digunakan untuk membuat laporan tertulis dan diinterpretasikan. Sehubungan dengan penelitian ini, penelitian kualitatif akan berkonsentrasi pada strategi komunikasi Pemerintah DIY dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hasil wawancara akan dianalisis, kemudian dideskripsikan, yang pada akhirnya dijadikan sebuah laporan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dari dilakukannya penelitian ini adalah pada Pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Melihat dari data berita bahwa pada tahun 2023 telah terjadi penurunan kualitas udara sebesar 70% yang dapat berakibat fatal terhadap Kesehatan Masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh kebijakan penutupan TPA Piyungan yang berimbas pada kebiasaan buruk Masyarakat untuk membuang sampah secara sembarangan dan tidak sesuai aturan.

TPA Piyungan dibangun pada tahun 1992 dan dibuka pada tahun 1995. Pengolahan sampah di TPA Piyungan Pada tahun 2000 dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY. Sekretariat Bersama (Sekber) Kartamantul mengelola sampah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2000. TPA Piyungan diperluas pada tahun 2015 menjadi 12,5 hektar untuk menampung tambahan 400–500 ton sampah yang dibuang ke sana setiap

harinya. Pemerintah Provinsi DIY mendapat kendali resmi atas penyelenggaraan TPA Piyungan pada tahun 2017 melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Jenis Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan pada penelitian ini antara lain :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain atau peneliti sebelumnya. Data sekunder dapat diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan penelitian. Data sekunder berfungsi sebagai informasi yang digunakan untuk menunjang data primer.

Tabel 1.5 Data Sekunder

No.	Jenis Data	Sumber Data	Keterangan
1.	Data Pengelolaan Sampah di DIY	Web PEMDA DIY	Pengumpulan Data
2.	Hasil Komunikasi Pemerintah DIY dan Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah	Jurnal dan Media Masa	Pengumpulan Data
3.	Respon Masyarakat terhadap penutupan TPA	Media sosial	Pengumpulan Data

	Piyungan		
--	----------	--	--

b. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian atau dari informasi yang diberikan oleh berbagai pihak mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DIY dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Tabel 1.6 Data Primer

No.	Jenis Data	Sumber Data
1.	Proses Komunikasi Pemerintah DIY	DLHK DIY BAPEDA DIY Pengelola TPA Piyungan

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merujuk pada tahapan di mana informasi atau data penting dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang tepat akan bervariasi sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, sumber data yang tersedia, dan tujuan penelitian yang ingin dicapai (*Desainpenelian,*) dalam penelitian kualitatif metode pengumpulan data menggunakan Prosedur wawancara dan Teknik dokumentasi. Metode

wawancara dilakukan dengan meliputi pihak yang cukup memahami pokok bahasan objek penelitian. Pendekatan wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur terhadap subjek penelitian, dilanjutkan dengan metode Teknik dokumentasi, seperti tinjauan pustaka, jurnal, undang-undang terkait, data statistik, dan penelitian dari penelitian sebelumnya (Pujaastwa, 2016)

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu interaksi komunikatif dimana individu atau sekelompok orang berinteraksi dengan pihak lain guna bertukar informasi, meningkatkan pemahaman mengenai topik tertentu, atau menghimpun data. Wawancara dapat diterapkan dalam berbagai format, baik secara langsung, tatap muka, melalui telepon, atau dengan dukungan teknologi seperti video konferensi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara dengan melibatkan beberapa pihak yang memiliki wewenang dan pengetahuan akan topik yang diteliti.

Tabel 1.7

Daftar Narasumber Penelitian

No.	Nama Narasumber	Jabatan	Keterangan
1.	Ninik Sri Handayani, S.si	Kepala BP2KLH DLHK DIY	Wawancara

2.	M.A. Fathoni S.si	Perencana Pertama BAPEDA DIY	Wawancara
3.	Ibnu Zulkarnato S.Psi	Staff administrasi TPA Piyungan	Wawancara

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan cara mengutip catatan dari dokumen atau arsip regulasi, yang dapat diakses melalui internet, mengutip data yang relevan dilakukan untuk melengkapi data. teknik dokumentasi pada penelitian ini mengutip pada jurnal terdahulu, artikel, situs web, dan buku.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana untuk menarik kesimpulan, kumpulan data informasi akan diinterpretasikan menggunakan kalimat menurut kategori penelitian kualitatif. Sehingga tujuan utama dalam analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Analisis adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menyelidiki subjek atau isu tertentu dengan maksud memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, mengenali pola, tren, atau hubungan, untuk mengambil keputusan atau menyusun rekomendasi berdasarkan data dan informasi yang tersedia.

Teknik analisis data adalah istilah yang menggambarkan pendekatan, alat, atau prosedur yang digunakan dalam memproses, menganalisis, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan dalam rangka penelitian. Tujuan utama dari penggunaan teknik analisis data adalah untuk mengidentifikasi pola, relasi, dan signifikansi dalam data guna memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian atau mencapai sasaran penelitian yang telah ditentukan (Sutriani & Octaviani, 2019)

a. Analisis Data

Analisis data merujuk pada tahap dimana data-data kasar yang berasal dari catatan tertulis dipilih, disederhanakan, dan diringkas. Dalam proses ini, penulis melibatkan pembuatan ringkasan serta pengkodean data yang diperoleh dari pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilaksanakan dengan mengilustrasikan situasi berdasarkan data yang telah diurutkan, kemudian disampaikan dalam laporan yang tersusun dengan baik dan mudah dimengerti.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah terkumpul, lalu menghubungkan dengan tujuan dari penulisan penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan,

menghubungkan, dan memilih fakta-fakta yang membantu dalam pemecahan masalah atau pertanyaan penelitian.